BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 22 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 perlu diatur standar biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dalam rangka penyusunan rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2015, untuk itu maka dipandang perlu diatur standar biaya masukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008, Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;

20. Peraturan.....

18. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener meriah .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener meriah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah satuan kerja perangkat kabupaten dilingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah selaku pengguna anggaran/barang;
6. Biaya adalah jumlah pengeluaran yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi;
7. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan;
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
9. Standar adalah sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga);
10. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan;
11. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
12. Standar biaya masukan adalah harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk PPn dan PPh serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku dipasaran apabila terdapat perubahan harga;
13. Standar Satuan Harga Dasar yang selanjutnya disebut SSHD adalah harga satuan yang berlaku dan dipakai sebagai standar dan tidak dapat melebihi;
14. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga satuan dalam bentuk kegiatan dan tidak dapat dirubah dari yang ditetapkan untuk setiap kegiatan.

BAB II.....

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 2

(1) Standar biaya masukan tahun anggaran 2015 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPK untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten berbasis kinerja Tahun Anggaran 2015.

(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya masukan Tahun Anggaran 2015 dapat juga berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.

(3) Standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
KOMPONEN STANDAR BIAYA MASUKAN DAN HARGA POKOK KEGIATAN

Pasal 3

(1) Standar biaya masukan ini digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPK dalam menyusun RKA serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

(2) Standar biaya masukan ini merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menyusun Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE), namun komponen upah, peralatan dan efisiensinya tidak meningkat.

(3) Apabila dalam penyusunan RKA tidak terdapat dalam peraturan ini, maka dapat mencantumkan satuan harga yang berlaku dipasaran dan khusus untuk harga barang diluar kabupaten ditambah biaya angkut sampai kelokasi pekerjaan.

Pasal 4

(1) Standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) terdiri dari SSHD dan HSPK.

(2) SSHD merupakan harga elemen penyusunan komponen kegiatan fisik/non fisik yang terdiri dari :

a. standar biaya honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS;
b. standar biaya uang lembur PNS;
c. standar bantuan beasiswa PNS dalam negeri;
d. standar biaya perjalanan dinas;
e. standar biaya uang harian dan transportasi lokal;
f. standar biaya pendidikan dan pelatihan;

g. standar.....

g. standar biaya makan penambah daya tahan tubuh dan pengadaan bahan makanan.

h. standar biaya penerjemahan dan pengetikan; dan

i. standar biaya sewa.

Pasal 5

(1) Uraian, satuan dan biaya yang terdapat pada standar biaya masukan dalam lampiran I Peraturan ini, SKPK dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, Standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) terdiri dari SSHD dan HSPK.

(2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener meriah .

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 27 Oktober 2014 M
3 Muharram 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : Oktober 2014 M
Muharram 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR:

LAMPIRAN 1 - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : Oktober 2014

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	**HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN**			
	1.1 Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran			
	Nilai pagu dana s.d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	700,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	800,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	950,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	1,100,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1,200,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,500,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,900,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	2,200,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,500,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3,000,000	
	1.2 Pejabat Pembuat Komitmen			
	Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	600,000	
	Nilai pagu Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	700,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	800,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	900,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1,000,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,300,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,600,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,800,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,100,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3,000,000	
	1.3 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 Juta	Orang/Bulan	250,000	
	Nilai pagu Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350,000	
	Nilai pagu Rp. 100 juta s.d 200 juta	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu di atas Rp. 200 juta	Orang/Bulan	1,000,000	
	1.4 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM			
	Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	550,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	850,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	950,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,200,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,500,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,700,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,000,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,400,000	
	1.5 Bendahara Pengeluaran			
	Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	550,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	850,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,050,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,500,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,700,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,000,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,400,000	
	1.6 Staf Pengelola/Pembantu Bendahara Pengeluaran			
	Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300,000	
	Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	550,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	800,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	950,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,150,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,300,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,500,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
2.	**HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA**			
	2.1 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang/Bulan	680,000	
	2.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	Nilai pagu s.d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	800,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	1,250,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1,750,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	2,100,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	2,400,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	2,750,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3,100,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3,500,000	
	2.3 Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	Nilai pagu s.d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	650,000	
	Nilai pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	900,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	1,100,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1,350,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1,600,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1,900,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	2,200,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	2,500,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2,800,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3,200,000	
	2.4 Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultan s.d Rp. 50 juta	Orang/Kegiatan	400,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultan 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Kegiatan	450,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Kegiatan	480,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	600,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	700,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	900,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1,050,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1,250,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	1,750,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	1,950,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2,200,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2,250,000	
3.	**PENGGUNA ANGGARAN**			
	3.1 Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)			
	Nilai Pagu s.d Rp. 250 milyar	Orang/Paket	3,580,000	
	3.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	Nilai Pagu s.d Rp. 250 milyar	Orang/Paket	3,230,000	
	3.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya s.d Rp. 25 milyar	Orang/Paket	1,510,000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya s.d Rp. 25 milyar s.d 50 milyar	Orang/Paket	1,750,000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya s.d Rp. 50 milyar s.d 100 milyar	Orang/Paket	1,990,000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya diatas 100 milyar	Orang/Paket	2,230,000	
4.	**HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA**			
	4.1 Pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa	Orang/Kegiatan	400,000	
	4.2 Panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa			
	Nilai pagu s.d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	600,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	900,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1,000,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1,250,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	1,400,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	1,600,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	1,800,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2,100,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
5.	**HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK (PDBP)**			
	5.1 Atasan Langsung Bendahara			
	Nilai pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	600,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	700,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	850,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1,200,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,500,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,800,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	2,100,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,350,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3,100,000	
	5.2 Bendahara			
	Nilai pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300,000	
	Nilai pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	550,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	700,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1,000,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1,250,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,400,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,700,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,900,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2,200,000	
	5.3 Anggota			
	Nilai pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250,000	
	Nilai pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	300,000	
	Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	350,000	
	Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	500,000	
	Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	750,000	
	Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	900,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1,100,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1,250,000	
	Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,400,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1,600,000	
6	**HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG DAERAH**			
	6.1 Pejabat pengurus barang	Orang/Bulan	400,000	
	6.2 Pejabat kuasa pengurus barang	Orang/Bulan	300,000	
7	**HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN**			
	7.1 Pembantu penelitian/perekayasaan	Orang jam	25,000	
	7.2 Koordinator penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	400,000	
	7.3 Sekretariat penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	300,000	
	7.4 Pengolah data penelitian/perekayasaan	Peneliti/Perekayasa	1,500,000	
	7.5 Petugas survey penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	700,000	
	7.6 Pembantu lapangan penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	750,000	
8	**HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEG. SEJENIS**			
	8.1 Honorarium Narasumber/Pembahas			
	Pejabat Eselon I yang disetarakan	Orang/jam	1,400,000	
	Pejabat Eselon II yang disetarakan	Orang/jam	1,000,000	
	Pejabat Eselon III kebawah	Orang/jam	900,000	
	8.2 Moderator	Orang/jam	700,000	
9	**HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEG. SEJENIS**			
	9.1 Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	450,000	
	9.2 Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000	
	9.3 Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000	
	9.4 Anggota	Orang/Kegiatan	300,000	
10	**HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI**			
	10.1 SLTA	Orang/Bulan	1,900,000	
	10.2 Sarjana Muda	Orang/Bulan	2,100,000	
	10.3 Sarjana Muda (S1)	Orang/Bulan	2,300,000	
	10.4 Master (S2)	Orang/Bulan	2,500,000	
11	**HONORARIUM ROHANIWAN**	Orang/Bulan	400,000	
12	**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**			
	12.1 Untuk kegiatan bersifat isendentil atau masa kegiatan s/d 1 bln atau satu kali kegiatan			
	Pengarah	Orang/Keg	750,000	
	Penanggungjawab	Orang/Keg	700,000	
	Ketua	Orang/Keg	650,000	
	Wakil Ketua	Orang/Keg	600,000	
	Sekretaris	Orang/Keg	500,000	
	Anggota	Orang/Keg	500,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	12.2 Untuk kegiatan yang dilaksanakan terus menerus setiap bulan			
	Pengarah	Orang/Bulan	500,000	
	Penanggungjawab	Orang/Bulan	450,000	
	Ketua	Orang/Bulan	400,000	
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350,000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	300,000	
	Anggota	Orang/Bulan	300,000	
	12.3 Sekretariat Panitia pelaksana kegiatan			
	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	500,000	
	Anggota	Orang/Bulan	450,000	
13	**HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL**			
	13.1 Penanggung jawab	Orang/Terbit	450,000	
	13.2 Redaktur	Orang/Terbit	350,000	
	13.3 Penyunting / Editor	Orang/Terbit	275,000	
	13.4 Design grafis /fotografer	Orang/Terbit	150,000	
	13.5 Sekretariat	Orang/Terbit	150,000	
	13.6 Pembuat Artikel per halaman	Orang/Terbit	150,000	
14	**HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH**			
	14.1 Penanggung jawab	Orang/Terbit	400,000	
	14.2 Redaktur	Orang/Terbit	300,000	
	14.3 Penyunting / Editor	Orang/Terbit	250,000	
	14.4 Design grafis /fotografer	Orang/Terbit	180,000	
	14.5 Sekretariat	Orang/Terbit	150,000	
	14.6 Pembuat Artikel per halaman	Orang/Terbit	150,000	
15	**HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE**			
	15.1 Penanggung jawab	Orang/Bulan	500,000	
	15.2 Redaktur	Orang/Bulan	450,000	
	15.3 Editor	Orang/Bulan	400,000	
	15.4 Web Admin	Orang/Bulan	350,000	
	15.5 Web Developer	Orang/Bulan	300,000	
	15.6 Pembuat Artikel per halaman	Orang/Bulan	100,000	
	15.6 Penerjemah	Orang/Bulan	100,000	
16	**HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI**			
	16.1 Atasan Langsung Pemegang Kas / KPA			
	Nilai pagu s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	350,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	450,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	550,000	
	Nilai pagu Rp. 100 milyar s.d Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	650,000	
	Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	800,000	
	16.2 Pemegang Kas / Bendahara			
	Nilai pagu s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	250,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	300,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu Rp. 100 milyar s.d Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	450,000	
	Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	550,000	
	16.3 Juru Bayar / Staf			
	Nilai pagu s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	200,000	
	Nilai pagu Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	250,000	
	Nilai pagu Rp. 50 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	300,000	
	Nilai pagu Rp. 100 milyar s.d Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	400,000	
	Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	450,000	
17	**VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**			
	17.1 Pendidikan Dasar			
	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	5,000	
	17.2 Pendidikan Menengah			
	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	7,500	
	17.3 Pendidikan Tinggi			
	Diploma I, II, III, IV dan Strata 1 (S1)			
	- Pemeriksaan hasil ujian	Mhs/Mata ujian	10,000	
	- Penguji tugas akhir / skripsi	Mhs/Mata ujian	150,000	
	Strata 2 (S2)			
	- Pemeriksaan hasil ujian	Mhs/Mata ujian	15,000	
	- Penguji tugas akhir / skripsi	Mhs/Mata ujian	250,000	
	Strata 3 (S3)			
	- Pemeriksaan hasil ujian	Mhs/Mata ujian	20,000	
	- Penguji Disertasi	Mhs/Mata ujian	350,000	
18	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PIDATO**			
	18.1 Pembina	Orang/Kegiatan	500,000	
	18.2 Pengarah	Orang/Kegiatan	475,000	
	18.3 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	400,000	
	18.3 Ketua	Orang/Kegiatan	300,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	18.4 Sekretaris	Orang/Kegiatan	250,000	
	18.5 Anggota	Orang/Kegiatan	200,000	
19	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PRESS RELEASE PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**			
	19.1 Pembina	Orang/Kegiatan	800,000	
	19.2 Pengarah	Orang/Kegiatan	775,000	
	19.3 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	750,000	
	19.4 Ketua	Orang/Kegiatan	700,000	
	19.4 Sekretaris	Orang/Kegiatan	650,000	
	19.5 Anggota	Orang/Kegiatan	500,000	
20	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA RADIO**			
	20.1 Pembina	Orang/Kegiatan	800,000	
	20.2 Pengarah	Orang/Kegiatan	775,000	
	20.3 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	750,000	
	20.4 Ketua	Orang/Kegiatan	700,000	
	20.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	650,000	
	20.6 Anggota	Orang/Kegiatan	500,000	
21	**HONORARIUM PENGAWAS UJIAN PENERIMAAN CPNS**	Orang/Hari	100,000	
22	**SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**			
	22.1 Golongan I dan II	Orang/Hari	25,000	
	22.2 Golongan III	Orang/Hari	27,000	
	22.3 Golongan IV	Orang/Hari	29,000	
23	**SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR**			
	23.1 **Uang Lembur**			
	23.2 Golongan I dan II	Orang/Jam	13,000	
	23.3 Golongan III	Orang/Jam	17,000	
	23.4 Golongan IV	Orang/Jam	20,000	
	23.5 Non PNS	Orang/Jam	12,000	
	23.6 **Uang Makan Lembur**			
	23.7 Golongan I dan II	Orang/Hari	25,000	
	23.8 Golongan III	Orang/Hari	27,000	
	23.9 Golongan IV	Orang/Hari	29,000	
24	**SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR**	Orang/Kali	200,000	
25	**HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI**	Orang/Bulan	1,750,000	
26	**KELOMPOK HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN/BARANG**			

26.1 **Bendahara PPK /PPKD :**

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	PPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	7,000,000	
2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	4,000,000	
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-DPKK)	Orang/Bulan	3,000,000	
4	Bendahara Pengeluaran	Orang/Bulan	1,500,000	
5	Bendahara Penerimaan	Orang/Bulan	1,500,000	
6	Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKKD	Orang/Bulan	1,000,000	
7	Pembantu Bendahara Penerimaan DPKKD	Orang/Bulan	1,000,000	

26.2 **Pengurus/penyimpanan Barang SKPK**

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pengurus Barang pada SKPK			
	- Nilai Aset s/d Rp. 500 Juta	Orang/bulan	500,000	
	- Nilai Aset diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	700,000	
	- Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	1,000,000	
2	Penyimpan Barang pada SKPK			
	- Nilai Aset s/d Rp. 500 Juta	Orang/bulan	500,000	
	- Nilai Aset diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	700,000	
	- Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	1,000,000	
3	Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang pada SKPK			
	- Nilai Aset s/d Rp. 500 Juta	Orang/bulan	400,000	
	- Nilai Aset diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	600,000	
	- Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	800,000	

27 **Kelompok Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber/Penceramah/Pemateri/Peserta pada Kegiatan Pendidikan/Pelatihan/Seminar,Orentasi/Workshop/Diskusi dan sejeninya**

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Ket
1	Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS/Non PNS dari Instansi/Non Instansi Dalam Daerah	Orang/jam	1,400,000	Pjb Eselon I/yg disetarakan
		Orang/jam	1,000,000	Pjb Eselon II/yg disetarakan
		Orang/jam	900,000	Pjb Eselon III ke bawah yang disetarakan
2	Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS/Non PNS dari Instansi/Non Instansi Luar Daerah	Pertatap Muka	4,800,000	
3	Pakar/ahli/profesional khusus yang mempunyai skill khusus (profesional) dalam bidang tertentu yang diundang khusus dari :			
	a. Dalam Daerah	Pertatap Muka	3,000,000	
	b. Luar Daerah	Pertatap Muka	6,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	4*) - Moderator	Orang/jam	200,000	
	- Pembawa Acara / MC	Pertatap Muka	300,000	
	- Notulis	Pertatap Muka	400,000	
	- Pembaca Al-Qur'an	Pertatap Muka	200,000	
	- Pembaca Do'a	Pertatap Muka	200,000	
	- Pemimpin Lagu	Pertatap Muka	200,000	
	5. Uang saku peserta lokakarya/seminar/pelatihan/bimtek/ Focus Group Discussion (FGD) atau sebutan lainnya	Orang/Hari	150,000	
	Keterangan :			
	1. Poin 1 minimal 1 jam pelajaran (45 menit), diberikan berdasarkan jenjang pendidikan/keahlian			
	2. Poin 2 dan 3b belum termasuk biaya transportasi			
	3. Poin 4 khusus moderator minimal 1 jam pelajaran (45 menit) maksimal 4 jam pelajaran/hari			
	*4. *) Jika dirangkap, hanya berhak atas satu honor yang menguntungkan*			
28	**Kelompok Staf Khusus/Penasehat dan Tim Asistensi/Tim Kerja/Tenaga Ahli/Tim Advokasi dan Sejenisnya dari Dalam Negeri**			
	No	**Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1	Honorarium tenaga ahli (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah	Orang/Bulan	3,000,000	
	2	Honorarium tim advokasi/komisi ahli (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah			
		- Pengarah/pembina	Orang/Bulan	3,000,000	
		- Penanggungjawab	Orang/Bulan	2,700,000	
		- Koordinator	Orang/Bulan	2,400,000	
		- Ketua	Orang/Bulan	2,100,000	
		- Sekretaris	Orang/Bulan	1,800,000	
		- Anggota sesuai kebutuhan rasional	Orang/Bulan	1,500,000	
	3	Honorarium tim advokasi/komisi ahli (baik dari unsur swasta maupun PNS) dari dalam dan luar daerah			
		a. Staf khusus	Orang/Bulan	6,500,000	
		b. Penasehat khusus	Orang/Bulan	5,000,000	
		c. Tim asistensi/tim kerja Bupati/Wakil Bupati			
		- Ketua	Orang/Bulan	4,000,000	
		- Wakil Ketua	Orang/Bulan	3,500,000	
		- Sekretaris	Orang/Bulan	3,000,000	
		- Anggota Sesuai kebutuhan yang rasional	Orang/Bulan	2,500,000	
		- Staf administrasi	Orang/Bulan	1,500,000	
	4	Honorarium narasumber pra rancangan/rancangan qanun	Orang/Pra/Raqan	4,000,000	
	5	Honorarium tim Satuan Tugas Sistem Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah (SIMDA)			
		- Ketua	Orang/Bulan	2,500,000	
		- Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,000,000	
		- Sekretaris	Orang/Bulan	1,750,000	
		- Koordinator admin	Orang/Bulan	1,500,000	
		- Anggota	orang/bulan	1,250,000	
	6	Honorarium konsultan pendamping impelementasi dan integrasi aplikasi SIMDA			
		- Ketua	Orang/Bulan	8,000,000	
		- Anggota	Orang/Bulan	7,000,000	
	7	Jasa Pengamanan POLRI			
		Ketua/Anggota	Orang/Bulan	2,000,000	
	Keterangan :				
	1. Poin 4 dan 6 diluar transportasi dan akomodasi bagi narasumber/konsultan luar daerah				
29	**Kelompok Honorarium Tenaga Kontrak dan Nama lainnya untuk Non PNS dan Uang Makan ADC. Non PNS**			
	No	**Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1	Tenaga administrator/operator komputer/tenaga kontrak/tenaga satpam/pengaman kantor/cleaning service dan nama lainnya.	Orang/Bulan	1,850,000	
	2	Honor Dokter umum/dokter gigi/setara	Orang/Bulan	2,500,000	
	3	Honorarium ADC non PNSD Bupati	Orang/Bulan	2,000,000	
	4	Honorarium tambahan khusus non PNS dalam rangka kelancaran tugas pimpinan.	Orang/Bulan		
		a. Staf khusus Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	3,500,000	
		b. ADC Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	2,500,000	
		c. ADC Sekda	Orang/Bulan	2,000,000	
		d. Dokter Pribadi Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	3,000,000	
		e. Sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekda	Orang/Bulan	2,000,000	
		f. Sopir Isteri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekda	Orang/Bulan	1,500,000	
		f. Pengamanan tertutup/melekat Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	1,500,000	
		g. Voreijder Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	1,500,000	
		h. Sopir/ADC (Staf ahli Bupati/Asisten/Kepala SKPK	Orang/Bulan	1,000,000	
	5	Uang makan ADC, Sopir, Voreijder Pamtup Bupati/Wakil Bupati/Isteri Bupati/wakil Bupati	Orang/Makan	20,000	
	6.	Honorarium petugas razia Satpol PP/WH	Orang/Kegiatan	132,000	
	Keterangan :				
	1.	Untuk poin 1 sudah termasuk uang makan			
	2.	Untuk poin 2 dianggarkan pada Belanja Langsung (Honorarium non PNS)			
	3.	Untuk poin 4.h Staf ahli tidak menggunakan ADC			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
30	**Kelompok Tim/Panitia/Pengelola WEB (PNS, Non PNS dari Dalam dan Luar Negeri)**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Yang bersifat insindentil/Temporer :*)			
	a. Pengarah Panitia	Orang/Bulan	900,000	
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	850,000	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	800,000	
	d. Ketua	Orang/Bulan	750,000	
	e. Wakil ketua	Orang/Bulan	700,000	
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	600,000	
	g. Anggota	Orang/Bulan	500,000	
	2 Yang bersifat simultan/terus menerus (PNS/Non PNS) dari dalam dan luar daerah			
	a. Pengarah Panitia	Orang/Bulan	700,000	
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	650,000	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	600,000	
	d. Ketua	Orang/Bulan	550,000	
	e. Wakil ketua	Orang/Bulan	500,000	
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	450,000	
	g. Anggota	Orang/Bulan	400,000	
	Keterangan :			
	*) Untuk priode 3 bulan atau 1 kali kegiatan insidentil dibayarkan sesuai kolom 4 perbulan atau perkegiatan			
	*) Periode 6 Bulan masing-masing ditambah Rp. 100.000,- dari kolom 4 perbulan			
	*) Periode 9 Bulan masing-masing ditambah Rp. 200.000,- dari kolom 4 perbulan			
31	**Kelompok Tim/Penulis/Pengola Data Hasil Narasumber dalam suatu Penelitian**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 a. Yang bersifat insindentil			
	- Pengarah pembina	Orang/Kali	2,000,000	
	- Penanggungjawab	Orang/Kali	1,800,000	
	- Koordinator	Orang/Kali	1,700,000	
	- Ketua	Orang/Kali	1,600,000	
	- Wakil ketua	Orang/Kali	1,500,000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	1,400,000	
	- Anggota	Orang/Kali	1,200,000	
	b. Yang bersifat simultan/terus menerus			
	- Pengarah pembina	Orang/Bulan	850,000	
	- Penanggungjawab	Orang/Bulan	800,000	
	- Koordinator	Orang/Bulan	750,000	
	- Ketua	Orang/Bulan	700,000	
	- Wakil ketua	Orang/Bulan	600,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	650,000	
	- Anggota		500,000	
	2 Yang bersifat perorangan/konsultan/lembaga pada suatu organisasi atau kelompok (PNS/Non PNS) dari dalam dan luar	Per Paket		
	Keterangan :			
	Untuk poin nomor 2 tarif paket ditetapkan sesuai sifat/bentuk penelitian yang rasional			
32	**Tim Penulis/Penyusun Pidato/Makalah/Persentase Bupati dan Sekretaris Daerah**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 Pelindung	Orang/Bulan	4,000,000	
	2 Pengarah	Orang/Bulan	3,500,000	
	3 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	3,200,000	
	4 Ketua	Orang/Bulan	3,100,000	
	5 Wakil Ketua	Orang/Bulan	3,000,000	
	6 Sekretaris	Orang/Bulan	2,800,000	
	7 Anggota	Orang/Bulan	2,700,000	
	8 Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	2,500,000	
	9 Staf Sekretariat	Orang/Bulan	2,200,000	
33	**Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Angkutan setempat dan uang saku	Orang/Hari	209,000	
	2 uang Makan	Orang/Hari	74,000	
	Jumlah	Orang/Hari	283,000	
34	**HONORARIUM TIM PEMBUAT WEB SITE**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Ketua	OK	2,200,000	
	2 Web Analyst	OK	2,000,000	
	3 Graphics Designer	OK	2,000,000	
	4 System Administrator	OK	2,000,000	
	5 Application Developer	OK	2,000,000	
	6 Web Developer	OK	2,000,000	
	7 Pembuat Artikel	Halaman	100,000	
	8 Penerjemah	1500 Karakter	100,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
35	**SATUAN BIAYA UANG LEMBUR, BIAYA MAKAN LEMBUR DAN BIAYA MAKAN KEGIATAN (PNS DAN NON PNS)**			
35.1	**Uang Lembur dan Uang Makan**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Uang Lembur Pejabat Daerah			
	a. Pejabat Struktural Eselon I	OJ	28,000	
	b. Pejabat Struktural Eselon II	OJ	24,000	
	c. Pejabat Struktural Eselon III	OJ	22,000	
	d. Pejabat Struktural Eselon IV	OJ	18,000	
	2 Uang Lembur Non Jabatan			
	a. Golongan I	OJ	10,000	
	b. Golongan II	OJ	13,000	
	c. Golongn III	OJ	17,000	
	d. Golongan IV	OJ	20,000	
	e. Staf	OJ	14,000	
	f. Honorer/ Tenaga Kontrak	OJ	8,000	
35.2	**Biaya Makan Kegiatan Rapat, Jamuan**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Nasi Kotak/ Prasmanan untuk VVIP	OP	100,000	
	2 Nasi Kotak/ Prasmanan untuk VVIP	OP	75,000	
	3 Minum dan Snack VVIP	OP	50,000	
	4 Nasi Kotak	OK	30,000	
	5 Minum	OP	10,000	
	6 Snack	OP	10,000	
35.3	**Biaya Makan Lembur**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Nasi Bungkus	OB	15,000	
	2 Minum	OP	10,000	
	3 Snack	OP	10,000	
36	**PAKET PERLENGKAPAN PERALATAN/ ATRIBUT PELATIHAN PER PESERTA**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Perlengkapan Pelatihan Peserta	1 Pack	145,000	
	Keterangan :			
	- Terdiri dari Tas, Badge, Writing Pad, Balpoin (Termasuk PPn)			
37	**KEBUTUHAN PENGELUARAN UNTUK PELATIHAN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Metode Harga Satuan			
	a. Akomodasi	Orang/Hari	450,000	
	b. Konsumsi (makan pagi, siang, malam dan 2x snack)	Orang/Hari	130,000	
	c. Sewa Tempat dan Peralatan (at cost)	Kegiatan	at cost	
	2 Metode Paket/ Full Board			
	a. Akomodasi, Konsumsi, Ruangan/Hall (twin)	Orang/Hari	500,000	
	b. Akomodasi, Konsumsi, Ruangan/Hall (single)	Orang/Hari	800,000	
38	**UANG MEUGANG**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 PNS	Orang/Kali	500,000	
	2 Non PNS	Orang/Kali	300,000	
	Keterangan :			
	- Dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung dan diberikan 3x dalam 1 tahun			
39	**UANG MAKAN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Uang Makan PNS/ Non PNS yang diberikan dalam bentuk uang	Orang/Hari	20,000	
	Keterangan :			
	- Dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung			
40	**Honorarium Tim penyusunan Dokumen Anggaran ,Tim pembahasan RKA/DPA SKPK**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Pengarah	O/B/K	2,000,000	
	2 Penanggungjawab	O/B/K	1,750,000	
	3 Ketua	O/B/K	1,500,000	
	4 Sekretaris	O/B/K	1,250,000	
	5 Anggota	O/B/K	1,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
41	**HONORARIUM PADA PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah			
	a. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Milyar			
	1. Ketua merangkap Anggota	OB Per Paket	1,600,000	
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB Per Paket	1,300,000	
	3. Anggota	OB Per Paket	1,100,000	
	4. Sekretariat	OB Per Paket	1,000,000	
	b. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 10 s.d 50 Milyar			
	1. Ketua merangkap Anggota	OB Per Paket	2,400,000	
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB Per Paket	1,900,000	
	3. Anggota	OB Per Paket	1,600,000	
	4. Sekretariat	OB Per Paket	900,000	
	c. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 50 Milyar			
	1. Ketua merangkap Anggota	OB Per Paket	3,700,000	
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB Per Paket	2,900,000	
	3. Anggota	OB Per Paket	2,400,000	
	4. Sekretariat	OB Per Paket	1,000,000	
	2 Tim Kajian			
	1. Ketua merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	1,100,000	
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB Per Paket	800,000	
	3. Anggota	OB Per Paket	750,000	
42	**HONORARIUM TIM EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN TENTANG APBK DAN TIM EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Tim Asistensi Evaluasi APBD			
	a. Pengarah	OB	2,000,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1,950,000	
	c. Koordinator	OB	1,850,000	
	d. Ketua	OB	1,750,000	
	e. Sekretaris	OB	1,650,000	
	f. Anggota	OB	1,500,000	
43	**HONORARIUM TIM EVALUASI RANCANGAN/KLARIFIKASI/TINDAKLANJUT HASIL KLARIFIKASI DAN EVALUASI QANUN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Pengarah/Penanggungjawab/Ketua/Sekretaris	OB		
	2 Wakil Sekretaris	OB	700,000	
	3 Anggota	OB	600,000	
44	**HONORARIUM TIM SEKRETARIAT TAPD**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 PNS			
	a. Anggota	OB	1,500,000	
	b. Operator Komputer	OB	700,000	
	2 NON PNS			
	Operator Komputer	OB	700,000	
45	**HONORARIUM PADA PROGRAM BIDANG HUKUM**			
49.1	**HONORARIUM PENELITIAN PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Pengarah	OB	1,700,000	
	2 Penanggungjawab	OB	1,600,000	
	3 Ketua	OB	1,500,000	
	4 Sekretaris	OB	1,400,000	
	5 Wakil Sekretaris	OB	1,300,000	
	6 Anggota	OB	1,200,000	
49.2	**HONORARIUM PENASEHAT HUKUM DAN TIM PENASEHAT HUKUM**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Penasehat Hukum pada Bidang Hukum	OB	2,000,000	
	2 Tim Penasehat Hukum	OB	2,000,000	
49.3	**HONORARIUM TIM ASISTENSI PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Pengarah	OB	3,000,000	
	2 Penanggungjawab	OB	2,750,000	
	3 Ketua	OB	2,500,000	
	4 Sekretaris	OB	2,300,000	
	5 Wakil Sekretaris	OB	2,200,000	
	6 Anggota	OB	2,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
46	**HONORARIUM JASA PELATIH**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	a PASKIBRAKA			
	1. Koordinator	Paket	3,500,000	
	2. Pelatih	Paket	3,000,000	
	3. Asisten Pelatih	Paket	1,750,000	
	4. Peserta	Paket	1,500,000	
	b PELATIH OLAHRAGA			
	1. Pelatih Internasional	OB	25,000,000	
	2. Pelatih Nasional	OB	15,000,000	
	3. Pelatih Daerah	OB	5,000,000	
	4. Asisten Pelatih	OB	2,500,000	
	5. Instruktur	OB	2,000,000	
	6. Konsultan Pelatih	OB	10,000,000	
	7. Uang Saku Atlet	OB	3,000,000	
47	**BONUS ATLET**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 PON			
	- Emas Perorangan	Paket	200,000,000	
	- Perak Perorangan	Paket	75,000,000	
	- Perunggu Perorangan	Paket	25,000,000	
	- Emas Beregu	Paket	300,000,000	
	- Perak Beregu	Paket	200,000,000	
	- Perunggu Beregu	Paket	100,000,000	
	2 PORWIL/ PRAPON			
	- Emas Perorangan	Paket	10,000,000	
	- Perak Perorangan	Paket	7,500,000	
	- Perunggu Perorangan	Paket	5,000,000	
	- Emas Beregu	Paket	25,000,000	
	- Perak Beregu	Paket	15,000,000	
	- Perunggu Beregu	Paket	5,000,000	
	3 KEJURNAS			
	- Emas Perorangan	Paket	10,000,000	
	- Perak Perorangan	Paket	7,500,000	
	- Perunggu Perorangan	Paket	5,000,000	
	- Emas Beregu	Paket	15,000,000	
	- Perak Beregu	Paket	7,500,000	
	- Perunggu Beregu	Paket	5,000,000	
	4 POPNAS/POPWIL/KEJURNAS PELAJAR/POMNAS/POMWIL/KEJURNAS MAHASISWA/PARALYMPIC			
	- Emas Perorangan	Paket	5,000,000	
	- Perak Perorangan	Paket	3,000,000	
	- Perunggu Perorangan	Paket	1,500,000	
	- Emas Beregu	Paket	10,000,000	
	- Perak Beregu	Paket	7,500,000	
	- Perunggu Beregu	Paket	5,000,000	
48	**TUNJANGAN PRESTASI KERJA BAGI PNS**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	I PEJABAT STRUKTURAL			
	1. Eselon III.a	OB	1,000,000	
	2. Eselon III.b	OB	800,000	
	3. Eselon IV.a	OB	700,000	
	4. Eselon IV.b	OB	600,000	
	5. Eselon V.a	OB	500,000	
	II PEJABAT TERTENTU LAINNYA			
	1. Sekretaris Daerah	OB	9,000,000	
	2. Asisten pada Sekretaris Daerah	OB	6,000,000	
	3. Kepala Dinas/ Badan dan Staf Ahli	OB	3,000,000	
	4. Kepala SKPK Eselon III.a dan III.b	OB	2,000,000	
	5. Pejabat Pengelola Keuangan Selaku BUD	OB	7,000,000	
	6. Kuasa Bendahara Umum Daearh	OB	4,000,000	
	7. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-DPKK	OB	3,000,000	
	8. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1,000,000	
	9. Sekretaris BAPPEDA	OB	2,000,000	
	10.Kabid BAPPEDA	OB	1,500,000	
	11. Kabid DPKK	OB	1,500,000	
	12. Lain-Lain			
	- Adc. Bupati, Adc Wakil Bupati, Adc Ketua DPRK	OB	850,000	
	- Supir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah	OB	850,000	
	- Supir Asisten, Supir Kepala SKPK	OB	850,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	13. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)			
	a. PPK Sekretaris/ Badan/ Dinas (Eselon III.a)	OB	1,100,000	
	b. PPK Kantor (Eselon IV.a)	OB	800,000	
	c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	OB	700,000	
	14. Pembantu PPK Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Insfektorat/ Kantor Camat			
	a. Golongan III	OB	600,000	
	b. Golongan II	OB	500,000	
	c. Golongan I	OB	400,000	
	15. Bendahara Pengeluaran SKPK			
	a. Golongan III	OB	700,000	
	b. Golongan II	OB	650,000	
	c. Golongan I	OB	600,000	
	16. Bendahara Pengeluaran DPKK/ PPKK			
	a. Golongan III	OB	900,000	
	b. Golongan II	OB	750,000	
	c. Golongan I	OB	600,000	
	17. Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKK/ PPKK			
	a. Golongan III	OB	750,000	
	b. Golongan II	OB	650,000	
	c. Golongan I	OB	600,000	
	18. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK			
	a. Golongan III	OB	600,000	
	b. Golongan II	OB	500,000	
	c. Golongan I	OB	400,000	
	19. Bendahara Penerimaan SKPK			
	a. Golongan III	OB	700,000	
	b. Golongan II	OB	600,000	
	c. Golongan I	OB	500,000	
	20. Bendahara Penerimaan DPKK/ PPKK			
	a. Golongan III	OB	900,000	
	b. Golongan II	OB	750,000	
	c. Golongan I	OB	600,000	
	21. Pembantu Bendahara Penerimaan DPKK/ PPKK			
	a. Golongan III	OB	700,000	
	b. Golongan II	OB	600,000	
	c. Golongan I	OB	500,000	
	22. Bendahara Pembantu Dinas Pendikan			
	a. Golongan III	OB	450,000	
	b. Golongan II	OB	350,000	
	c. Golongan I	OB	300,000	
	23. Bendahara Barang SKPK			
	a. Golongan III	OB	700,000	
	b. Golongan II	OB	600,000	
	c. Golongan I	OB	500,000	
	24. Kepala Ruangan Pada RSUD Bener Medriah	OB	500,000	
	25. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah			
	a. Kepala SMA/ SMK	OB	500,000	
	b. Wakil Kepala SMA/ SMK	OB	350,000	
	c. Kepala SMP	OB	450,000	
	d. Wakil Kepala SMP	OB	300,000	
	e. Kepala SD	OB	400,000	
	f. Kepala TK	OB	300,000	
	26. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/ Gigi)			
	a. Golongan IV	OB	1,000,000	
	b. Golongan III	OB	800,000	
	27. Tenaga Fungsional (Medis/ Paramedis)			
	a. Golongan IV	OB	400,000	
	b. Golongan III	OB	300,000	
	c. Golongan II	OB	250,000	
	28. Tenaga Fungsional (Auditor Pengawas)			
	a. Auditor Ahli Madya	OB	1,000,000	
	b. Auditor Ahli Muda	OB	900,000	
	c. Auditor Ahli Pratama	OB	800,000	
	d. Auditor Trampil Pelaksana	OB	600,000	
	29. Fungsional (Guru/ Pendidik)			
	a. Golongan IV	OB	250,000	
	b. Golongan III	OB	200,000	
	c. Golongan II	OB	150,000	
	30. Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)			
	a. Golongan IV	OB	500,000	
	b. Golongan III	OB	400,000	
	c. Golongan II	OB	300,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	31. Tenaga Fungsional Lainnya			
	a. Golongan IV	OB	500,000	
	b. Golongan III	OB	400,000	
	c. Golongan II	OB	300,000	
	31. Tenaga Administrasi/ Staf			
	a. Golongan IV	OB	500,000	
	b. Golongan III	OB	400,000	
	c. Golongan II	OB	300,000	
	d. Golongan I	OB	250,000	
49	**HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 DIKLAT PIM Tk.IV			
	a. Uang Saku	Orang Hari	100,000	
	b. Bantuan PKL	Orang Kegiatan	1,500,000	Dalam Daerah
	2 DIKLAT PIM Tk.III			
	a. Biaya Pendidikan *)			
	b. Uang Saku	Orang Hari	100,000	
	c. Bantuan Hidup dan Uang Buku (Luar Daerah)	Orang Hari	150,000	
	d. Bantuan PKL			
	- Dalam Daerah	Orang Kegiatan	2,000,000	
	- Luar Daerah	Orang Kegiatan	3,000,000	
	3 DIKLAT PIM Tk.II			
	a. Biaya Pendidikan *)			
	b. Bantuan Hidup dan Uang Buku (Luar Daerah)	Orang Hari	400,000	
	d. Bantuan PKL (Luar Daerah)	Orang Kegiatan	6,000,000	
	4 DIKLAT PIM Tk.I			
	a. Biaya Pendidikan *)			
	b. Bantuan Hidup dan Uang Buku (Luar Daerah)	Orang Hari	450,000	
	d. Bantuan PKL (Luar Daerah)	Orang Kegiatan	8,000,000	
	5 LEMHANAS			
	a. Biaya Pendidikan *)			
	b. Bantuan Hidup dan Uang Buku (Luar Daerah)	Orang Hari	600,000	
	d. Bantuan PKL (Luar Daerah)	Orang Kegiatan	10,000,000	
	Keterangan			
	*) Sesuai Indeks Biaya Yang Ditentukan			
50	**BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL			
	2 a. Uang Saku	Orang Hari	100,000	
	3 b. Pengadaan Sertifikasi	Lembar	100,000	
51	**BIAYA DIKLAT TEKNIS/DIKLAT FUNGSIONAL (LUAR DAERAH), DAN LUAR NEGERI DENGAN**			
	DURASI WAKTU 5 HARI ATAU LEBIH			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Akomodasi dan Konsumsi Ditanggung Penyelenggara			
	a. SPPD selama 2 hari (PP)			*)
	b. Biaya Kontribusi			**)
	c. Bantuan Uang Saku, Transfortasi Lokal, Uang Buku, dll (hari 3 dan seterusnya) :			
	1. GOL. IV			
	- Luar Daerah	Orang Hari	350,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	700,000	
	2. GOL. III			
	- Luar Daerah	Orang Hari	250,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	600,000	
	3. GOL. II			
	- Luar Daerah	Orang Hari	200,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	500,000	
	2 Akomodasi dan Konsumsi Tidak Ditanggung Penyelenggara	Orang Hari		
	a. SPPD selama 8 hari (PP)			*)
	b. Biaya Kontribusi			**)
	c Penyelenggaraan Diklat > 8 Hari			***)
	d. Bantuan Uang Saku, Transfortasi Lokal, Uang Buku, dll (hari ke 9 s.d hari ke 15) :			
	1. GOL. IV			
	- Luar Daerah	Orang Hari	700,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	1,500,000	Penginapan Dibayar At Cost Sesuai Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas
	2. GOL. III			
	- Luar Daerah	Orang Hari	600,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	1,200,000	
	3. GOL. II			
	- Luar Daerah	Orang Hari	500,000	
	- Luar Negeri	Orang Hari	1,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Keterangan :			
	*) Sesuai Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas			
	**) Sesuai Penetapan Lembaga Diklat			
	***) 1 s.d 8 hari diberi SPPD Sesuai Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas			
52	**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PNS YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DILINGKUNGAN KABUPATEN**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 TUGAS BELAJAR			
	A. Luar Daerah *)			
	1. Strata-3 (Non Eksakta)	5x Termin	55,000,000	
	2. Strata-3 (Eksakta)	5x Termin	65,000,000	*) Penyesuaian Berdasarkan
	3. Strata-2 (Non Eksakta)	2x Termin	60,000,000	Evaluasi dan Kebutuhan Dasar
	4. Strata-2 (Eksakta)	2x Termin	55,000,000	
	B. Dalam Daerah			
	1. Strata-2 (Non Eksakta)	2x Termin	40,000,000	
	2. Strata-2 (Eksakta)	2x Termin	35,000,000	
	C. Dokter Spesiallis			
	1. PPDS-1 (Universitas Indonesia)	5x Termin	65,000,000	
	2. PPDS-1 (Luar Daerah)	5x Termin	60,000,000	
	1. PPDS-1 (Dalam Daerah)	5x Termin	45,000,000	
	D. Luar Negeri (Asia Tenggara)			
	1. Strata-2	3x Termin	90,000,000	
	E. Bantuan Untuk Kerjasama Antar Lembaga**)			
	1. Biaya English For Purpose	1x Termin	5,000,000	**) Pendidikan Pasca Sarjana
	2. Bantuan Living Cost	1x Termin	25,000,000	dengan Pendanaan di Luar
	3. Bantuan Administrasi Pasport	1x Termin	5,000,000	APBK
	2 IZIN BELAJAR			
	1. Strata-2	2x Termin	10,000,000	
	1. Strata-3	5x Termin	15,000,000	
53	**SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN DIKLAT/DIKLAT PRAJABATAN/DIKLAT DLM JABATAN PADA BKPP**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Makan Peserta Diklat	OH	65,000	3 Kali Sehari
	2 Snack Peserta Diklat	OH	20,000	2 Kali Sehari
	3 Makan/Snack Peserta Diklat dlm rangka Observasi Lapangan	OH	200,000	
	4 Tas Kegiatan terdiri dari Ballpoint, Badge Nama, Buku Tulis, Dan Isi Lainnya	OK	250,000	
54	**HONORARIUM TIM INSTRUKTUR SENAM KESEJAHTERAAN JASMANI**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Instruktur Senam	OB	1,200,000	
55	**HONORARIUM TIM PEMERIKSA/PENELITI ADM PENGADAAN BARANG DAN JASA**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Petugas Pemeriksa/Peneliti Adm Pengadaan Barang dan Jasa	OB	1,000,000	
56	**HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**			
	No **Uraian**	**Satuan**	**Standar Biaya**	**Ket**
	1 **2**	**3**	**4**	**5**
	1 Pengarah	OB	2,700,000	
	2 Penanggung Jawab	OB	2,600,000	
	3 Ketua/ Admin PPE	OB	2,500,000	
	4 Sekretaris	OB	2,000,000	
	5 Admin Agency/Admin Sistem/Trainer/Verifikator/Helpdesk	OB	1,750,000	
	dst Staf Sekretariat	OB	700,000	

57 BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI

57,1 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sekali Jalan)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	BIAYA TAKSI (Rp.)
1	Aceh	105,000
2	Sumatera Utara	96,000
3	Riau	82,000
4	Kepulauan Riau	107,000
5	Jambi	70,000
6	Sumatera Barat	147,000
7	Sumatera Selatan	105,000
8	Lampung	129,000
9	Bengkulu	94,000
10	Bangka Belitung	70,000
11	Banten	335,000
12	Jawa Barat	70,000
13	DKI Jakarta	250,000
14	Jawa Tengah	58,000
15	D.I Yogyakarta	82,000
16	Jawa Timur	147,000
17	Bali	117,000
18	Nusa Tenggara Barat	56,000
19	Nusa Tenggara Timur	84,000
20	Kalimantan Barat	105,000
21	Kalimantan Tengah	82,000
22	Kalimantan Selatan	105,000
23	Kalimantan Timur	341,000
24	Sulawesi Utara	129,000
25	Gorontalo	135,000
26	Sulawesi Barat	147,000
27	Sulawesi Selatan	141,000
28	Sulawesi Tengah	56,000
29	Sulawesi Tenggara	135,000
30	Maluku	201,000
31	Maluku Utara	129,000
32	Papua	370,000
33	Irian Jaya Barat	147,000

57.2 Batas Maksimum Satuan Biaya Tiket Pesawat (Pergi - Pulang)

(dalam rupiah)

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	TIKET BISNIS	TIKET EKONOMI
1	Bener Meriah	Medan		611,000
2	Bener Meriah	Banda Aceh		555,000
3	Banda Aceh	Jakarta	7,519,000	4,991,000
4	Banda Aceh	Balikpapan	12,739,000	7,498,000
5	Banda Aceh	Bandar Lampung	8,225,000	5,288,000
6	Banda Aceh	Banjarmasin	10,792,000	6,691,000
7	Banda Aceh	Batam	10,439,000	6,595,000
8	Banda Aceh	Biak	18,718,000	11,231,000
9	Banda Aceh	Kendari	11,110,000	7,377,000
10	Banda Aceh	Malang	10,204,000	7,820,000
11	Banda Aceh	Mataram	10,846,000	6,940,000
12	Banda Aceh	Medan	3,466,000	2,436,000
13	Banda Aceh	Palangka Raya	10,546,000	6,691,000
14	Banda Aceh	Kendari	12,953,000	7,820,000
15	Banda Aceh	Denpasar	10,835,000	6,976,000
16	Banda Aceh	Jayapura	19,167,000	11,907,000
17	Banda Aceh	Jogjakarta	9,765,000	5,977,000
18	Banda Aceh	Makassar	12,760,000	7,534,000
19	Banda Aceh	Manado	15,798,000	8,806,000
20	Banda Aceh	Pontianak	9,990,000	6,488,000
21	Banda Aceh	Semarang	9,530,000	5,894,000
22	Banda Aceh	Solo	9,530,000	6,048,000
23	Banda Aceh	Surabaya	10,985,000	6,382,000
24	Banda Aceh	Timika	18,504,000	11,195,000
25	Medan	Jakarta	7,252,000	4,231,000
26	Jakarta	Ambon	13,285,000	7,867,000
27	Jakarta	Bengkulu	4,364,000	2,912,000
28	Jakarta	Gorontalo	7,231,000	5,360,000
29	Jakarta	Jambi	4,065,000	2,555,000
30	Jakarta	Kupang	9,413,000	5,645,000
31	Jakarta	Mamuju	7,295,000	5,407,000
32	Jakarta	Manokwari	16,223,000	12,026,000
33	Jakarta	Padang	5,530,000	3,280,000
34	Jakarta	Palembang	3,861,000	2,520,000
35	Jakarta	Palu	9,348,000	5,681,000
36	Jakarta	Pangkal Pinang	3,412,000	2,376,000
37	Jakarta	Pekan Baru	5,583,000	3,351,000
38	Jakarta	Ternate	10,001,000	7,404,000

57.3 Satuan Biaya Uang Harian dan Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN LUAR KOTA	UANG HARIAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	UANG HARIAN DIKLAT	TRANSPORTASI LOKAL
1	2	3	4	5	6	6
1	Aceh	OH	396,000	165,000	121,000	71,000
2	Sumatera Utara	OH	407,000	165,000	121,000	71,000
3	Riau	OH	407,000	165,000	121,000	71,000
4	Kepulauan Riau	OH	407,000	165,000	121,000	71,000
5	Jambi	OH	407,000	165,000	121,000	71,000
6	Sumatera Barat	OH	418,000	165,000	121,000	71,000
7	Sumatera Selatan	OH	418,000	165,000	121,000	71,000
8	Lampung	OH	418,000	165,000	121,000	71,000
9	Bengkulu	OH	418,000	165,000	121,000	71,000
10	Bangka Belitung	OH	451,000	176,000	132,000	82,000
11	Banten	OH	407,000	165,000	121,000	71,000
12	Jawa Barat	OH	473,000	187,000	143,000	93,000
13	DKI Jakarta	OH	583,000	231,000	176,000	126,000
14	Jawa Tengah	OH	407,000	165,000	121,000	71,000
15	D.I Yogyakarta	OH	462,000	187,000	143,000	93,000
16	Jawa Timur	OH	451,000	176,000	132,000	82,000
17	Bali	OH	528,000	209,000	154,000	104,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	484,000	198,000	143,000	93,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	473,000	187,000	143,000	93,000
20	Kalimantan Barat	OH	418,000	165,000	121,000	71,000
21	Kalimantan Tengah	OH	396,000	154,000	121,000	71,000
22	Kalimantan Selatan	OH	418,000	165,000	121,000	71,000
23	Kalimantan Timur	OH	473,000	187,000	143,000	93,000
24	Kalimantan Utara	OH	473,000	187,000	143,000	93,000
25	Sulawesi Utara	OH	407,000	165,000	121,000	71,000
26	Gorontalo	OH	407,000	165,000	121,000	71,000
27	Sulawesi Barat	OH	451,000	176,000	143,000	93,000
28	Sulawesi Selatan	OH	473,000	187,000	121,000	71,000
29	Sulawesi Tengah	OH	407,000	165,000	121,000	71,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	418,000	165,000	121,000	71,000
31	Maluku	OH	418,000	165,000	121,000	71,000
32	Maluku Utara	OH	473,000	187,000	143,000	93,000
33	Papua	OH	638,000	253,000	187,000	137,000
34	Papua Barat	OH	528,000	209,000	154,000	90,000

57.4 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II
1	2	3	4	5	6		6
1	Aceh	OH	4,420,000	1,308,000	1,080,000	410,000	435,000
2	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,218,000	703,000	505,000	356,500
3	Riau	OH	3,817,000	1,161,000	86,800	450,000	437,000
4	Kepulauan Riau	OH	4,011,000	1,094,000	650,000	502,000	322,000
5	Jambi	OH	4,705,000	1,211,000	425,500	382,000	333,500
6	Sumatera Barat	OH	4,988,000	1,345,000	529,000	477,000	425,500
7	Sumatera Selatan	OH	5,505,000	1,444,000	591,100	514,000	322,000
8	Lampung	OH	4,658,888	1,528,000	430,100	374,000	409,400
9	Bengkulu	OH	1,529,000	929,000	688,850	599,000	586,500
10	Bangka Belitung	OH	3,362,000	1,352,000	612,950	533,000	349,600
11	Banten	OH	4,480,000	1,682,000	639,400	797,000	460,000
12	Jawa Barat	OH	4,310,000	2,062,000	571,550	515,000	532,450
13	DKI Jakarta	OH	4,376,000	1,176,000	701,500	610,000	460,000
14	Jawa Tengah	OH	4,877,000	1,708,000	517,500	497,000	402,500
15	D.I Yogyakarta	OH	5,435,000	1,468,000	607,200	629,000	445,050
16	Jawa Timur	OH	5,176,000	1,598,000	557,750	499,000	328,900
17	Bali	OH	5,742,000	2,129,000	1,039,600	904,000	756,700
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4,034,000	1,437,000	621,000	540,000	414,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3,529,000	1,176,000	632,500	662,000	460,000
20	Kalimantan Barat	OH	2,823,000	1,329,000	494,500	430,000	379,500
21	Kalimantan Tengah	OH	3,529,000	1,877,000	534,750	558,000	501,400
22	Kalimantan Selatan	OH	5,000,000	1,885,000	575,000	500,000	435,850
23	Kalimantan Timur	OH	4,705,000	1,715,000	632,500	550,000	517,500
24	Kalimantan Utara	OH	4,705,000	1,715,000	632,500	550,000	517,500
25	Sulawesi Utara	OH	3,764,000	1,827,000	575,000	549,000	333,500
26	Gorontalo	OH	1,552,000	1,188,000	471,500	423,000	276,000
27	Sulawesi Barat	OH	1,482,000	1,211,000	460,000	425,000	414,000
28	Sulawesi Selatan	OH	5,670,000	1,335,000	619,850	539,000	431,250
29	Sulawesi Tengah	OH	2,388,000	1,523,000	460,000	493,000	379,500
30	Sulawesi Tenggara	OH	2,176,000	1,258,000	517,500	488,000	483,000
31	Maluku	OH	3,529,000	1,211,000	556,600	545,000	322,000
32	Maluku Utara	OH	3,658,000	1,778,000	483,000	478,000	437,000
33	Papua	OH	3,352,000	1,792,000	529,000	460,000	476,100
34	Papua Barat	OH	3,235,000	1,743,000	460,000	798,000	425,500

57.5 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	373
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Asutria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211

	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudia Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Asutralia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Koledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
58	**SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN**			
	58.1 Daerah terpencil	Orang/Hari	200,000	
	58.2 Daerah tidak terpencil	Orang/Hari	150,000	
59	**SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL**			
	59.1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkt	30,261,000	
	59.2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkt	22,125,000	
	59.3 Diklat Pimpinan Tk. IIV	Peserta/Angkt	20,230,000	
60	**SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN**			
	60.1 Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkt	4,470,000	
	60.2 Golongan III	Peserta/Angkt	5,545,000	
61	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**			
	61.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	70,000	
	61.2 Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	630,000	
	61.3 Printer	Unit/Tahun	600,000	
	61.4 AC Split	Unit/Tahun	530,000	
	61.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6,250,000	
	61.6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	7,500,000	
	61.7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8,820,000	
	61.8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	9,360,000	
	61.9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	11,520,000	
	61.10 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	12,860,000	
	61.11 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	13,770,000	
	61.12 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	14,580,000	
	61.13 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	15,430,000	
	61.14 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	18,200,000	
	61.15 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	19,940,000	
	61.16 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	22,250,000	
	61.17 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	27,590,000	
62	**SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN**			
	62.1 Dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia			
	a. Dari Bahasa Inggris	Halaman Jadi	140,000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220,000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160,000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160,000	
	62.2 Dari bahasa Bahasa Indonesia ke Asing			
	a. Bahasa Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	140,000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220,000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160,000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160,000	
63	**SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI**			
	63.1 Program Diploma I, II, III dan Diploma IV/Strata I			
	a. Biaya Hidup dan Biaya opersional			
	- Diploma I dan Diploma III	Orang/Tahun	15,300,000	
	- Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun	16,200,000	
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun			
	- Diploma I	Orang/Tahun	1,250,000	
	- Diploma III	Orang/Tahun	1,500,000	
	- Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun	1,750,000	
	63.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2			
	a. Biaya Hidup dan Biaya opersional			
	- Strata 2 dan Specialis 1	Orang/Tahun	19,700,000	
	- Strata 3 dan Specialis 2	Orang/Tahun	20,300,000	
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun			
	- Strata 2 dan Specialis 1	Orang/Tahun	2,000,000	
	- Strata 3 dan Specialis 2	Orang/Tahun	2,250,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
64	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDERAAN DINAS**			
	64.1 Pejabat			
	a. Pejabat Negara	Unit/Tahun	44,350,000	
	b. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	42,900,000	
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	41,349,000	
	64.2 Operasional			
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	32,800,000	
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	35,120,000	
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	3,480,000	
65.	**SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN**	Per Hari	6,800,000	
66	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL PEJABAT**	Unit	651,800,000	
	a. Pejabat Eselon I	Unit	702,970,000	
	b. Pejabat Eselon II	Unit	412,210,000	
67.1	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA EMPAT**			
	67.1.1 Pick Up	Unit	192,200,000	
	67.1.2 Minibus	Unit	284,550,000	
	67.1.3 Double Gardan	Unit	437,850,000	
67.2	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA DUA**			
	67.2.1 Operasional	Unit	18,800,000	
	67.1.2 Lapangan	Unit	31,000,000	
68.	**SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS**			
	68.1 Pakaian Kerja Dokter	Stel	610,000	
	68.2 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	460,000	
	68.3 Pakaian Seragam Mahasiswa/i	Stel	400,000	
	68.4 Pakaian kerja sopir / pesuruh	Stel	460,000	
	68.5 Pakaian Kerja Satpam	Stel	980,000	

69. SATUAN BIAYA SEWA KENDERAAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR
1	2	3	4		5
1	Aceh	Per Hari	710,000	1,900,000	3,400,000
2	Sumatera Utara	Per Hari	650,000	1,800,000	2,700,000
3	Riau	Per Hari	730,000	2,000,000	2,900,000
4	Kepulauan Riau	Per Hari	760,000	2,000,000	3,300,000
5	Jambi	Per Hari	650,000	1,800,000	2,800,000
6	Sumatera Barat	Per Hari	640,000	1,700,000	2,700,000
7	Sumatera Selatan	Per Hari	640,000	1,800,000	3,400,000
8	Lampung	Per Hari	640,000	1,700,000	2,700,000
9	Bengkulu	Per Hari	650,000	1,800,000	2,800,000
10	Bangka Belitung	Per Hari	710,000	1,900,000	2,900,000
11	Banten	Per Hari	640,000	1,700,000	2,700,000
12	Jawa Barat	Per Hari	650,000	1,900,000	2,800,000
13	DKI Jakarta	Per Hari	650,000	1,800,000	2,800,000
14	Jawa Tengah	Per Hari	640,000	1,700,000	2,700,000
15	D.I Yogyakarta	Per Hari	650,000	1,800,000	2,700,000
16	Jawa Timur	Per Hari	640,000	1,700,000	2,700,000
17	Bali	Per Hari	730,000	2,100,000	2,800,000
18	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	730,000	2,100,000	2,800,000
19	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	740,000	2,200,000	3,000,000
20	Kalimantan Barat	Per Hari	720,000	1,900,000	3,100,000
21	Kalimantan Tengah	Per Hari	760,000	2,400,000	3,400,000
22	Kalimantan Selatan	Per Hari	650,000	1,800,000	2,900,000
23	Kalimantan Timur	Per Hari	750,000	2,000,000	3,300,000
24	Kalimantan Utara	Per Hari	750,000	2,000,000	3,300,000
25	Sulawesi Utara	Per Hari	740,000	1,900,000	3,200,000
26	Gorontalo	Per Hari	680,000	1,800,000	2,800,000
27	Sulawesi Barat	Per Hari	650,000	1,800,000	2,800,000
28	Sulawesi Selatan	Per Hari	640,000	2,100,000	2,800,000
29	Sulawesi Tengah	Per Hari	710,000	1,800,000	2,900,000
30	Sulawesi Tenggara	Per Hari	710,000	1,900,000	2,900,000
31	Maluku	Per Hari	820,000	2,500,000	3,500,000
32	Maluku Utara	Per Hari	830,000	2,600,000	3,600,000
33	Papua	Per Hari	950,000	3,500,000	4,500,000
34	Papua Barat	Per Hari	900,000	3,000,000	3,900,000

70. BIAYA BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
1	2	3	4	5
1	Aceh	OH	32,000	27,000
2	Sumatera Utara	OH	32,000	27,000
3	Riau	OH	32,000	27,000
4	Kepulauan Riau	OH	32,000	27,000
5	Jambi	OH	32,000	27,000
6	Sumatera Barat	OH	32,000	27,000
7	Sumatera Selatan	OH	32,000	27,000
8	Lampung	OH	32,000	27,000
9	Bengkulu	OH	32,000	27,000
10	Bangka Belitung	OH	32,000	27,000
11	Banten	OH	30,000	25,000
12	Jawa Barat	OH	30,000	25,000
13	DKI Jakarta	OH	30,000	25,000
14	Jawa Tengah	OH	30,000	25,000
15	D.I Yogyakarta	OH	30,000	25,000
16	Jawa Timur	OH	30,000	25,000
17	Bali	OH	38,000	32,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	38,000	32,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	38,000	32,000
20	Kalimantan Barat	OH	36,000	30,000
21	Kalimantan Tengah	OH	36,000	30,000
22	Kalimantan Selatan	OH	36,000	30,000
23	Kalimantan Timur	OH	36,000	30,000
24	Kalimantan Utara	OH	36,000	30,000
25	Sulawesi Utara	OH	36,000	30,000
26	Gorontalo	OH	36,000	30,000
27	Sulawesi Barat	OH	36,000	30,000
28	Sulawesi Selatan	OH	36,000	30,000
29	Sulawesi Tengah	OH	36,000	30,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	36,000	30,000
31	Maluku	OH	38,000	32,000
32	Maluku Utara	OH	38,000	32,000
33	Papua	OH	44,000	37,000
34	Papua Barat	OH	44,000	37,000

71 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

71.1 Pejabat Eselon I dan II

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5
1	Aceh	236,000	400,000	1,008,000
2	Sumatera Utara	204,000	328,000	800,000
3	Riau	190,000	280,000	640,000
4	Kepulauan Riau	227,000	321,000	693,000
5	Jambi	190,000	290,000	740,000
6	Sumatera Barat	173,000	235,000	820,000
7	Sumatera Selatan	254,000	337,000	710,000
8	Lampung	228,000	280,000	754,000
9	Bengkulu	190,000	280,000	770,000
10	Bangka Belitung	287,000	390,000	901,000
11	Banten	280,000	340,000	820,000
12	Jawa Barat	300,000	408,000	921,000
13	DKI Jakarta	280,000	400,000	740,000
14	Jawa Tengah	209,000	280,000	740,000
15	D.I Yogyakarta	245,000	405,000	743,000
16	Jawa Timur	250,000	344,000	722,000
17	Bali	350,000	490,000	1,640,000
18	Nusa Tenggara Barat	327,000	517,000	785,000
19	Nusa Tenggara Timur	230,000	350,000	740,000
20	Kalimantan Barat	200,000	250,000	621,000
21	Kalimantan Tengah	217,000	368,500	720,000
22	Kalimantan Selatan	200,000	335,000	930,000
23	Kalimantan Timur	295,000	401,000	763,000
24	Kalimantan Utara	295,000	401,000	763,000
25	Sulawesi Utara	228,000	347,000	790,000
26	Gorontalo	190,000	270,000	830,000
27	Sulawesi Barat	210,000	320,000	690,000
28	Sulawesi Selatan	206,000	355,000	1,000,000
29	Sulawesi Tengah	224,000	320,000	810,000
30	Sulawesi Tenggara	210,000	380,000	785,000
31	Maluku	246,000	340,000	815,000
32	Maluku Utara	287,000	456,000	829,000
33	Papua	276,000	336,000	870,000
34	Papua Barat	230,000	340,000	802,000

71.2 Pejabat Eselon III ke Bawah

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5
1	Aceh	198,000	300,000	650,000
2	Sumatera Utara	172,000	275,000	540,000
3	Riau	139,000	185,000	505,000
4	Kepulauan Riau	140,000	240,000	620,400
5	Jambi	183,000	282,000	546,000
6	Sumatera Barat	145,000	220,000	522,000
7	Sumatera Selatan	215,000	259,000	614,000
8	Lampung	167,000	236,000	640,000
9	Bengkulu	180,000	220,000	705,000
10	Bangka Belitung	261,000	297,000	600,000
11	Banten	208,000	290,000	655,000
12	Jawa Barat	219,000	274,000	703,000
13	DKI Jakarta	230,000	330,000	630,000
14	Jawa Tengah	150,000	210,000	540,000
15	D.I Yogyakarta	209,000	307,000	540,000
16	Jawa Timur	200,000	329,000	543,000
17	Bali	230,000	395,000	1,000,000

18	Nusa Tenggara Barat	250,000	411,000	646,000
19	Nusa Tenggara Timur	185,000	305,000	520,000
20	Kalimantan Barat	186,000	224,000	558,000
21	Kalimantan Tengah	209,000	336,000	576,000
22	Kalimantan Selatan	175,000	295,000	759,000
23	Kalimantan Timur	200,000	335,000	615,000
24	Kalimantan Utara	200,000	335,000	615,000
25	Sulawesi Utara	159,000	240,000	665,000
26	Gorontalo	172,000	235,000	755,000
27	Sulawesi Barat	160,000	280,000	465,000
28	Sulawesi Selatan	180,000	310,000	825,000
29	Sulawesi Tengah	180,000	251,000	550,000
30	Sulawesi Tenggara	186,000	277,000	550,000
31	Maluku	150,000	288,000	563,000
32	Maluku Utara	132,000	180,000	535,000
33	Papua	178,200	327,000	748,000
34	Papua Barat	205,000	305,000	550,000

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014 M

PENJELASAN
LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1 Pejabat Pengguna/ Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

1.2 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

1.3 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), honorarium hanya diberikan pada satu kegiatan dari beberapa kegiatan yang sifatnya tidak terus menerus dalam satu tahun anggaran berjalan dan dapat diberikan honorarium pada kegiatan lain sepanjang kegiatan yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan kegiatan yang lain.

1.4 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

Pejabat Penguji Tagiahan dan Penanda Tanganan SPM, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

1.5 Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendahara Pengeluaran, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

2.1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

2.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling kurang 3 (tiga) orang.

Catatan:
Dalam hal Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.

2.3 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi Barang

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

2.4 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

3. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal melakukan penetapan seleksi/pemenang atas pelelangan atau penyediaan pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa non barang/konstruksi/jasa lainnya.

4. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola PDBP. Jumlah staf/anggota pengelola PDBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PDBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PDBP setiap satuan kerja.

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Daerah

Honorarium pengurus/penyimpan barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksan tugas rutin selaku pengurus / penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium peneliti dan pembantu peneliti (nonfungsional peneliti) diberikan kepada Pegawai Negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian melebihi jam kerja normal atau diluar jam kerja. Kelebihan jam kerja yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) jam sehari.

8. Hononorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi

Honorarium kegiatan diberikan kepada Pejabat Setingkat Eselon dan Pejabat Negara lainnya dan Pegawai Negeri yang memberikan informasi kepada Pegawai Negeri/Masyarakat, honorarium narasumber Pegawai Negeri dapat diberikan dengan ketentuan :

a. berasal dari luar unit eselon II penyelenggara.
b. berasal dari unit eselon II penyelenggaran sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unti eselon II lainnya/masyarakat. Pembahas hanya

dapat dihadirkan untuk kegiatan seminar.

c. berasal dari luar unit penyelenggara.

d. berasal dari PNS atau luar PNS.

Pakar/praktisi/pembicara khusus yang diundang sesuai dengan bidang atau penyelenggaran seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi.

9. **Hononorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis**

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasil dan sejenis sepanjang

peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eseion I penyelenggara/masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/disceminasi/kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai negeri harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.

10. **Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri**

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

11. **Honorarium Rohaniwan**

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan, dan kegiatan lainnya. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniwan.

12. **Honorarium Tim dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan**

a. Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPK/KPA

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur

b) bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain

c) bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diperioritaskan atau diluar jam kerja

d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil disamping tugas pokok sehari-hari

e) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi/pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

13. **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**

Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur kesekretariatan adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

14. **Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah**

Honorarium tim penyusun buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara priodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

15. **Honorarium Tim Pengelola Website**

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Eselon II.

16. **Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai**

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat berwenang.

17. **Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian**

Vakasi/honoraraium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.

18. **Honorarium Tim Penyusunan Pidato**

Honorarium tim penyusun pidato dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menghimpun pidato berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pidato yang dimaksud disini adalah pidato Kepala Daerah.

19. **Honorarium Tim Penyusunan Press Release Pemerintah Kabupaten Bener Meriah**

Honorarium tim penyusun press release Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk peliputan kegiatan Bupati dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

20. **Honorarium Tim Penyusunan Berita Radio**

Honorarium tim penyusun berita radio dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun berita Daerah (Pemda Bener Meriah).

21. **Honorarium Pengawas Ujian Penerimaan CPNS**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengawas peserta seleksi ujian CPNS, pengawasan dilakukan sesuai dengan penunjukan melalui

surat atau keputusan dari pejabat yang berwenang.

22. **Satuan Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Uang makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Besaran satuan biaya uang makan untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

23. **Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah. Uang lembur pada hari libur dibayarkan 200 % dari ketentuan biaya lembur pada hari kerja biasa.

24. **Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor**

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.
Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:

a. melibatkan peserta dari pejabat eselon/masyarakat;
b. dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja;
c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; dan
f. surat pernyataan pelaksanan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan

Catatan:

a. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi.
b. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

25. **Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti**

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service diperuntukan bagi nonpegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya.

26. **Honorarium Pengelola Keuangan/Barang**

Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai.

27. **Honorarium Kelompok Pengajar / Fasilitator / Instruktur / Narasumber / Penceramah / Pemateri / Peserta pada Kegiatan Pendidikan / Pelatihan / Seminar, Orentasi / Workshop / Diskusi dan sejeninya.**

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya / masyarakat dalam Kegiatan Seminar/Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan

	Teknis/Workshop/Discussion/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
28.	**Honorarium Kelompok Staf Khusus/Penasehat dan Tim Asistensi/Tim Kerja/Tenaga Ahli/Tim Advokasi dan Sejenisnya dari Dalam Negeri.** Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
29.	**Honorarium Tenaga Kontrak dan Nama lainnya untuk Non PNS dan Uang Makan ADC. Non PNS.** Honorarium dan Uang Makan yang hanya diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya sebagai Tenaga Kontrak dan Adc Non PNS.
30.	**Honorarium Kelompok Tim/Panitia/Pengelola WEB (PNS, Non PNS dari Dalam dan Luar Negeri).** Honorarium Tim Panitia/Pengelola WEBSITE dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang beri tugas untuk mengelola Website, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
31.	**Honorarium Kelompok Tim/Penulis/Pengola Data Hasil Narasumber dalam suatu Penelitian.** Honorarium Tim/Penulis/Pengola Data Hasil Narasumber dalam suatu Penelitian dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang beri tugas untuk mengelola Website, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
32.	**Tim Penulis/Penyusun Pidato/Makalah/Persentase Bupati dan Sekretaris Daerah** Honorarium Tim Penulis/Penyusun Pidato/Makalah/Persentase Bupati dan Sekretaris Daerah dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang beri tugas untuk mengelola Website, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
33.	**Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota** Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat diberikan kepada PNS/Non PNS yang melaksanakan Tugas yang ditunjuk sesuai Surat Perintah Tugas dapat diberikan Uang Saku, Biaya Angkutan dan Uang Makan.
34.	**Honorarium Tim Pembuat WEB SITE** Honorarium Tim Pembuat WEBSITE dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang beri tugas untuk membuat Website, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
35.	**Satuan Biaya Uang Lembur, Biaya Makan Lembur Dan Biaya Makan Kegiatan (PNS Dan Non PNS).** Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang, uang lembur diperuntukan bagi PNS semua golongan dan Pegawai Non PNS.
36.	**Paket Perlengkapan Peralatan/ Atribut Pelatihan Per Peserta** Satuan Paket Perlengkapan Peralatan/ Atribut Pelatihan Per Peserta merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan Kegiatan Pelatihan kepada PNS / Non PNS dan Masyarakat.
37.	**Kebutuhan Pengeluaran Untuk Pelatihan** Satuan Kebutuhan Pengeluaran untuk Pelatihan merupakan satuan biaya untuk kebutuhan Pelatihan meliputi Konsumsi, Akomodasi dan Sewa Tempat Pelatihan.
38.	**Uang Meugang** Uang Meugang merupakan kompensasi bagi PNS dan Non PNS.
39.	**Uang Makan** Uang Makan diberikan kepada PNS dan Pegawai Non PNS dihitung berdasarkan jumlah

hari kerja.

40. **Honorarium Tim Penyusun Dokumen Anggaran, Tim Pembahasan RKA/DPA SKPK**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas Menyusun Dokumen Anggaran, Membahas RKA/DPA SKPK.

41. **Honorarium Pada Program dan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

42. **Honorarium Tim Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Tentang APBK dan Tim Evaluasi Dokumen Perencanaan.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas Mengevaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Tentang APBK dan Tim Evaluasi Dokumen Perencanaan.

43. **Honorarium Tim Evaluasi Rancangan/Klarifikasi/Tindaklanjut Hasil Klarifikasi Dan Evaluasi Qanun.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas Mengevaluasi Rancangan/Klarifikasi/Tindaklanjut Hasil Klarifikasi Dan Evaluasi Qanun.

44. **Honorarium Tim Sekretariat TAPD**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

45. **Honorarium Program pada Bidang Hukum**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas penerbitan Produk Hukum meliputi SK, Peraturan Kepala Daerah dan Qanun.

46. **Honorarium Jasa Pelatih**

Honorarium Jasa Pelatih dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk melatih masyarakat agar terampil.

47. **Bonus Atlet**

Bonus Atlet merupakan kompensasi kepada seluruh Atlet Cabang Olah Raga.

48. **Tunjangan Prestasi Kerja**

Tunjangan diberikan kepada PNS dihitung berdasarkan Tanggung Jawab, Beban Kerja dan Golongan PNS.

49. **Honorarium dan Satuan Biaya Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat ditunjuk untuk melaksanakan suatu tugas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Diklat meliputi Biaya Pendidikan, Uang Saku dan Bantuan PKL.

50. **Biaya Diklat Teknis Fungsional**

Satuan Biaya Diklat Teknis Fungsional merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan Kegiatan Diklat Teknis Fungsional kepada PNS / Non PNS dan Masyarakat meliputi Uang Saku dan Pengadaan Sertifikasi.

51.	**Biaya Diklat Teknis/Diklat Fungsional (Luar Daerah), Dan Luar Negeri Dengan Durasi Waktu 5 Hari Atau Lebih.** Satuan Biaya Diklat Teknis Fungsional merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan Kegiatan Diklat Teknis Fungsional kepada PNS / Non PNS dan Masyarakat meliputi Biaya Akomodasi, Konsumsi, Uang Saku, Biaya Transportasi Lokal, Uang Buku dan Biaya Angkutan PP.
52.	**Satuan Biaya Pendidikan Bagi Pns Yang Mengikuti Tugas Belajar Dan Izin Belajar Dilingkungan Kabupaten.** Satuan Biaya Pendidikan Bagi Pns Yang Mengikuti Tugas Belajar Dan Izin Belajar Dilingkungan Kabupaten merupakan kompensasi kepada PNS untuk meningkatan Pendidikan dan Sumber Daya Manusisa berdasarkan Keputusan Pejabat Esselon I/KPA.
53.	**Satuan Biaya Makan Dan Minum Kegiatan Diklat/Diklat Prajabatan/Diklat Dlm Jabatan Pada BKPP** Satuan Biaya Makan dan Minum merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan Kegiatan Diklat/Diklat Prajabatan/Diklat Dlm Jabatan Pada BKPP kepada PNS.
54.	**Honorarium Tim Instruktur Senam Kesejahteraan Jasmani** Honorarium Tim Instruktur Senam Kesejahteraan Jasmani dapat diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk melatih Senam Kesejahteraan Jasmani.
55.	**Honorarium Tim Pemeriksa/Peneliti Adm Pengadaan Barang Dan Jasa** Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas memproses kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
56.	**Honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Esselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana untuk melaksanakan suatu tugas memproses kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui sarana elektronik.
57.	**Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Provinsi** 57.1 Biaya taksi Perjalanan Dinas..... 57.2 Tiket bus umum, kapal laut, pesawat udara, disesuaikan dengan ongkos yang berlaku (biaya real/at cost) pada saat melakukan perjalanan dinas termasuk air port tax untuk perjalanan menggunakan pesawat udara. 57.3 Biaya uang harian dapat dibayarkan sesuai lamanya perjalanan dinas dan Uang transportasi lokal hanya dibayarkan pada saat atau kapan sampai ketempat tujuan bukan lamanya perjalanan dinas. 57.4 Biaya penginapan tidak dibayarkan sesuai dengan lamanya perjalanan dinas tetapi dibayar selama waktu menginap ditempat tujuan dan atau ditempat transit dari dan ke Redelong. Uang penginapan dibayarkan menurut eselon bagi Pegawai yang bepergian keluar daerah tersebut dibayarkan tunai biaya real (at cost). Biaya penginapan dibebankan sesuai dengan biaya real dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang berangkat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel tempat tujuan sesuai dengan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 57.5 Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut: Golongan B : pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, dan

pejabat lainnya yang setara.
Golongan C : pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan yang setara.
Golongan D : pegawai negeri sipil selain yang dimaksud pada huruf a dan b.
Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
Contoh:
Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

58. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan dalam Kabupaten

Uang transport dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten.

Untuk Pegawai Negeri Sipil, satuan biaya dapat diberikan sepanjang :

a. Tidak menggunakan kenderaan dinas.
b. Disertai surat tugas.
c. Tidak bersifat rutin.

59. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu, satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

60. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

61. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Computer/Notebook, Printer, AC split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

62. Satuan Biaya Penerjemah dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang dimaksud.

63. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Strata 1 dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 dan strata 3) dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.

64. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dan Operasional Kenderaan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk

mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.
Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

65. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain yang sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

66. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon.

67.1 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Empat

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau lapangan roda 4 (empat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

67.2 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Dua

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis bebek. Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis sport/trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

68. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
   Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun.
b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat
   Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
   2) dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki izin prinsip dari Bupati.
c. Satuah Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna
   Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan yang penyediaannya dilakukan secara selektif, paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
d. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh

Satuan biaya pakaian kerja. sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

69. Satuan Biaya Sewa Kenderaan

Satuan biaya untuk sewa kenderaan sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi, sewa kenderaan bukan lamanya suatu kegiatan tetapi sewa kenderaan tersebut berlaku saat melaksanakan perjalanan saja (dihitung dengan jadwal kegiatan dilapangan).

70. Biaya Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan diberikan kepada pasien rumah sakit, anak asuhan (panti), tuna sosial.

71. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselengarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 2 (dua)jenis:

a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eseion I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon I/eselon II;
b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eseion III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon III

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalary 3 (tiga) jenis:

a. Paket Fullboard
Satuan biaya paket fultboard. disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (terinasuk screen projector, podium, flip chart, wthite board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).

b. Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard souryd system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).

c. Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podiurn, flip Chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI